

---

## Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme dan Sosialisme

**Ahmad Jalili**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
STAIN Sulthan Abdurrahman Kepulauan Riau  
[jalili@stainkepri.ac.id](mailto:jalili@stainkepri.ac.id)

**Hasbi Umar**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[mhasbi68@gmail.com](mailto:mhasbi68@gmail.com)

**Hermanto Harun**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[man\\_hr@yahoo.com](mailto:man_hr@yahoo.com)

**Abstract:** Justice was a benchmark in an economic system. With the implementation of the current economic system, such as the capitalist and socialist economic systems, there were often social injustices in the economy. The measure was a large number of social inequalities between communities that spike in poverty or unemployment in the country. Therefore we need an economic system solution for the welfare of the people, namely an Islamic economic system. One of the solutions presented in the Islamic economic system was zakat. Zakat was one of the commands of the Islamic religion which was considered worship or good deeds that can influence others. Islam places great importance on justice in all matters. Justice must be served to everyone. Islam also regulates justice in the economic field. This study reveals justice that was highly emphasized that Islam was justice in the distribution of assets, one of which was zakat.

**Keywords :** zakat, islamic economics, capitalism economics, socialism economics

**Abstrak:** Keadilan merupakan sebuah tolak ukur dalam sebuah sistem perekonomian. Dalam penerapan sistem ekonomi saat ini seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, sering terjadi di dalamnya ketidakadilan ekonomi masyarakat. Ukuran yang menjadikannya tidak adil adalah banyaknya ketimpangan sosial antar masyarakat yang mengakibatkan terjadinya lonjakan kemiskinan atau lonjakan pengangguran di negara tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem ekonomi yang dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan rakyat yaitu sistem ekonomi Islam. Salah satu solusi yang dihadirkan dalam sistem ekonomi Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu dari perintah agama islam yang dinilai ibadah atau perbuatan baik yang dapat memberikan pengaruh bagi sesama. Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara. Keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja. Islam juga mengatur keadilan dalam bidang ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam ialah keadilan dalam distribusi harta salah satunya zakat.

**Kata Kunci :** zakat; ekonomi islam; ekonomi kapitalisme; ekonomi sosialisme

## Pendahuluan

Perintah untuk membayar zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap umat muslim dimanapun berada. Sebagai salah satu bentuk ibadah wajib, perintah membayar zakat juga memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian umat. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui pengelolaan dana zakat dengan baik. Salah satu jenis zakat yaitu zakat produktif yang disalurkan melalui program pemberdayaan.

Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan antara lain : kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya: pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik.

Konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem

kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.

Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ini justru lebih menyengsarakan rakyat diatas slogan “demi kesejahteraan rakyat bersama” menjadi kedok penganut sistem ini. Namun ternyata lebih menyengsarakan karena tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik untuk dieksploitasi pemegang kekuasaan. Selain itu, karyawan secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator dan buruh dijadikan budak untuk bekerja seperti mesin. Kemudian, aspek pendidikan moral individu diabaikan, sehingga para buruh bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, sementara semua hasil kegiatan diambil untuk tujuan ekonomi yang bermutu. Dengan demikian, dibalik usaha memupuk persaudaraan dan kerjasama yang baik antara penguasa dan majikan, timbul rasa tidak enak hati di antara para buruh kepada majikan sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan rasa dendam. Di tengah-tengah kemunduran sistem kapitalis dan sosialis sebagai penguasa ekonomi dunia, membuat banyak cendekiawan muslim berjibaku mengenalkan, menghidupkan, dan menggali kembali ekonomi Islam. Sistem

ekonomi Islam datang dengan tujuan untuk menyeimbangkan tingkat pendapatan dan menyelaraskan perekonomian melalui pertimbangan syariat, halal dan legal dan dengan sistem keadilan guna mensejahterakan masyarakat, dan meringankan perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi islam sebenarnya telah ada sejak 14 abad yang lalu. Pemikiran ekonomi islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Sistem ekonomi islam, lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya lebih didasarkan atas sumber islam, al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem ekonomi islam dapat dipraktekan oleh masyarakat manapun juga. Prinsip dasar ekonomi islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

### Zakat

Kata *zakat* berasal dari bahasa Arab زكاة atau *zakah* yang berarti *bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang*. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan mengeluarkan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).*

Zakat memiliki peranan penting dalam mensejahterakan dan membangun kemajuan ekonomi masyarakat. Qardhawi menyatakan bahwa zakat tidak hanya berperan terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 telah menetapkan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakati tu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam ketentuan hukum Islam, macam-macam zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat Nafs (jiwa) atau sering disebut zakat fitrah yang merupakan zakat untuk mensucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentuk makanan pokok atau berupa uang yang nilainya sebanding dengan

makanan pokok tersebut. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah ini adalah satu sha' (satu gantang), baik untuk jagung, anggur kering, kurma, gandum maupun yang menjadi makanan pokok lainnya

2. Zakat Mal (Zakat Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang yang sudah ditentukan, setelah dimilikinya selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah seorang muslim, baligh, merdeka, berakal, kepemilikan sepenuhnya, mencapai nisab, dan mencapai haul. Sedangkan syarat sah juga menurut kesepakatan para ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini telah dijelaskan didalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

## Keadilan Ekonomi Perspektif Islam

Ekonomi islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad alislam. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan didalam Al-Quran diantaranya “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” (Luqman : 19) dan “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan” (al-Maidah ; 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran. Disini dapat diajukan beberapa definisi menurut ekonomi muslim (Farida, 2014).

1. Manan (1992:19) di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.
2. Menurut M.M. Metwally, “Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti islam yang mengikuti Al-Quran, Hadits, Ijma” dan Qiyas.
3. Menurut Umar Capra, “Ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social, serta jaringan moral masyarakat.

Secara umum, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan

ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.

Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, yakni untuk mencapai *falah* yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*). Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam al-Quran dengan menunjukkan kata "keadilan" sebanyak 1000 kali, sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan (Sasono et al., 1999). Ketika membahas terkait keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya.

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga

konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan berekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja (Nasution & Effendy, 1995).

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai „tidak menzalimi dan tidak dizalimi.“ Implikasinya ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku

ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan (Karim, 2014).

Dalam tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat *ihsan*, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Makna adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak milik orang lain dan tidak berbuat dzalim. Kemudian *ihsan*, diartikan selalu mempertinggi atau meningkatkan mutu amal dan perbuatan, berbuat yang lebih baik dari pada yang sudah-sudah. Sedangkan maksud dari larangan berbuat keji kepada orang lain merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Karena dosa dari perbuatan keji mengakibatkan kerusakan pergaulan serta keturunan kita yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan *fakhsya*. (Hamka, 1983)

### Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta (Rahardja & Manurung, 2008). Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *Contemporary Economics* tahun 1977, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Secara luas, di dalam sistem ekonomi Kapitalisme ini alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran yang utama berada di tangan swasta (pribadi maupun perusahaan). Dengan ciri-ciri utamanya antara lain; pemilikan alat produksi;

pertukaran dan distribusi yang tak terlarang; kebebasan ekonomi; laba sebagai pendorong kegiatan produksi; kebebasan pasar dan persaingan; keabsahan monopoli; perbankan dan keberadaan bunga; disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan; eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya.

Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip "Keadilan" yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai "Pengamat" dan "Pelindung" dalam perekonomian.

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry kelemahan ekonomi Kapitalisme dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain; Pertama, dari sisi hak milik. Ekonomi Kapitalis menyandarkan hak pemilikan oleh swasta merupakan tanda utama Kapitalisme. Dalam arti, sistem ini mempercayai swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapat laba. Konsep seperti ini, dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya kehancuran masyarakat Kapitalis.

Kedua, dari sisi kebebasan ekonomi. Ekonomi Kapitalisme menempatkan kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang seperti judi dan

pelacuran. Konsekuensinya kekayaan dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.

Ketiga, dari sisi monopoli. Kapitalisme sangat memuja persaingan. Maka, dengan pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadi merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Konsekuensinya, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Lebih dari itu, siklus perdagangan (*business cycle*), produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan hal akan berujung pada terjadinya depresi ekonomi.

Keempat, dari sisi bunga. Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan Kapitalisme. Praktek perbankan adalah menggunakan basis bunga (*interest based*). Dimana salah satu pihak (*nasabah*), bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya (*bank*) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, *nasabah* dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggung jawaban waktu pembayaran hutang tersebut, dengan tidak memperdulikan, apakah usaha *nasabah* mengalami keuntungan ataupun tidak. Praktek seperti ini jelas merupakan ketidakadilan, karena merugikan dan bertindak dhalim terhadap salah satu pihak dan serta merta menguntungkan pihak lainnya (Mannan, 1997).

Kelima, dari sisi eksploitasi. Konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau

penindasan. Sehingga seolah menjadi pandangan umum melihat penindasan yang dilakukan si kuat terhadap si lemah, seperti pekerja ditindas majikan, petani diperas tuan tanah, si miskin dieksploitasi si kaya, pembantu ditindas majikan, rakyat ditindas penguasa, dan di atas itu semua keuangan negara dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan.

Keenam, dari sisi distribusi kekayaan. Dengan paham kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi oleh individu atau swasta, maka otomatis disparitas ekonomi akan muncul. Perbedaan hak yang sangat mencolok antara majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Penerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan pemberi upah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ketrampilan teknik yang sempurna, dan pekerjaan yang baik.

Keseimbangan distribusi ekonomi yang rusak dan celah yang dalam antara si kaya dan si miskin, pada akhirnya akan mengarah pada pertentangan sosial antar kelas dan kehancuran sistem itu sendiri. Konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis perusahaan di miliki oleh perorangan. Konsep kapitalisme cenderung memahami bahwa pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan penguasa. Bila penguasa mendapatkan keuntungan maka secara tidak

langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat terabaikan dan diabaikan (Rozalinda, 2014).

Pada sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak terjadinya keburukan dalam bermasyarakat. Karena sistem tersebut mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta memunculkan semangat persaingan antar individu, sehingga hanya mementingkan kehidupan perseorangan saja tanpa memperdulikan individu lainnya. Yang terjadi di masyarakat adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, hal ini dikarenakan distribusi kekayaan yang tidak seimbang pada masyarakat. Selain itu juga terdapat ketidakadilan antara hak majikan dan pekerja yang memperdalam masalah yang terjadi pada si kaya dan si miskin. Ekonomi kapitalis mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat umum serta membatasi mengalirkan kekayaan pada kalangan orang tertentu saja. Prinsip keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis adalah bahwa setiap orang akan menerima imbalan berdasarkan apa yang sudah ia lakukan. Dengan minimnya campur tangan pemerintah, maka sistem ini membuat pemerintah hanya sebagai pengamat, dan pelindung perekonomian (Rahardja & Manurung, 2008).

### **Ekonomi Sosialis**

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang.

Maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah

negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi. Selain itu juga, bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan. Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh Negara dan menghilangkan milik swasta (Deliarnov, 2012).

Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komonisme. Keputusan keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat. Komonisme dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrem dinatar golongan kiri sosialis, sebab untuk mencapai masyarakat komonis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba

dikomando ini sering juga disebut sistem "Perekonomian Komando". Begitu juga karena dalam sistem komonis Negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komonis juga sering disebut "sistem ekonomi Totaliter". Istilah lain yang sering digunakan adalah "anarkisme" Istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi social pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, melainkan



dipercayakan kepada asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem social kemasyarakatan yang ada (Rahardja & Manurung, 2008).

Pada sistem sistem ekonomi Sosialisme kelemahannya dapat dilihat dari sisi berikut ini; Pertama, dari sisi pemilikan. Sistem ekonomi Sosialisme meletakkan pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi, menyebabkan manajemen seluruh alat produksi itu ada di tangan birokrasi. Perjalanan mesin ekonomi yang berlangsung secara birokratik akan berakibat pada terjadinya inefisiensi, produksi rendah, dan akhirnya meruntuhkan sistem itu sendiri. Selain itu, individu menjadi sulit mengembangkan diri karena senantiasa dikontrol oleh negara, bahkan atas nama kepentingan bersama hak asasi manusia sering kali terabaikan (Rozalinda, 2016; Hasan & Mahyudi, 2020).

Kedua, dari sisi materialisme. Sosialisme dengan alat analisis Marx tidak percaya kepada agama. Karena tahap kemajuan manusia ditentukan melulu oleh setiap pengaruh antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang bertentangan, sehingga peran Tuhan tidak ada sama sekali. Konsep ini lahir dari keyakinan Sosialisme bahwa agama ikut melegitimasi eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar lewat konsep akhirnya yang membuat manusia melupakan dunia, agama juga memandang kemiskinan sebagai kebaikan, dan Tuhan, hanyalah ciptaan khayalan manusia semata.

Ketiga, dari sisi regimentasi dan totalitarianisme. Komunisme bentuk baru dari Sosialisme mencita-citakan sebuah negara totalitarianisme. Di dalam negara seperti ini, kelas borjuis ditiadakan dan kediktatoran yang kuat oleh kaum proletar dibangun. Hak-hak fundamental dan kebebasan sipil dimusnahkan dan manusia disetel sehingga hanya berstatus sebagai binatang ekonomi semata yang bertugas

sebagai mesin produksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Keempat, dari sisi kesamaan ekonomi. Dalam bentuk teori, Sosialisme mengklaim bertujuan untuk kesamaan ekonomi, walaupun tidak pernah teralisasi. Bahkan atas nama kesamaan ekonomi meniscayakan adanya pemerintahan diktator, atau jika perlu totaliter.

Dari argumentasi di atas terbukti bahwa Sosialisme tidak mampu membawa masyarakat pada kemajuan ekonomi. Sosialisme meniscayakan pemusatan kekuasaan di tangan Diktator Proletariat. Karnanya, membuat kaum miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ekonomi yang memadai. Sistem ekonomi ini juga meniscayakan ateisme dan tidak mengakui hak individu yang mengakibatkan sistem ini tidak melahirkan dinamika.

Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. dalam sistem ekonomi sosialis sangat berbeda dengan aktivitas yang terjadi di pasar bebas, namun redistribusi kekayaannya berdasarkan kepada wewenang politik atau negara untuk dapat menghasilkan keadilan secara sosial. Sistem ini menjadikan pemerintah memiliki andil dalam mengatur keberlangsungan perekonomian di sebuah negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi sosialis ini justru lebih menyengsarakan rakyat diatas slogan "demi kesejahteraan rakyat bersama" menjadi kedok penganut sistem ini. Namun ternyata lebih menyengsarakan karena tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik untuk dieksploitasi pemegang kekuasaan. Selain itu, karyawan secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator dan buruh

dijadikan budak untuk bekerja seperti mesin. Kemudian, aspek pendidikan moral individu diabaikan, sehingga para buruh bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, sementara semua hasil kegiatan diambil untuk tujuan ekonomi yang bermutu. Dengan demikian, dibalik usaha memupuk persaudaraan dan kerjasama yang baik antara penguasa dan majikan, timbul rasa tidak enak hati di antara para buruh kepada majikan sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan rasa dendam.

### Kesimpulan

Keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Konsep adil disini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Dilarangnya perilaku ekonomi dengan monopoli atau ihtikar, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Kita diperintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta dolarang dengan keras untuk mengurangi hak milik orang lain. Islam juga melarang sistem ekonomi yang menyengsarakan rakyat seperti sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Karena itulah sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi solutif dalam mensejahterakan masyarakat demi mencapai falah atau kesejahteraan ekonomi.

### Daftar Pustaka

Deliarnov. (2012). *Perkembangan Pemikiran*

- Ekonomi, Ed.3* (edisi ke-3). Raja Grafindo Persada.
- Farida, A. S. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Juz XII-XI). Pustaka Panjimas.
- Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34.  
<https://doi.org/10.35316/ISTIDLAL.V4I1.206>
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Press.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terj. M. Nastangin*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Nasution, H., & Effendy, B. (1995). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Ed-3*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (ke-1)*. Rajawali.
- Sasono, A., Hafidhuddin, D., & Saefuddin, A. . (1999). *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*.